



**SEMINAR NASIONAL IAPA WILAYAH SULAWESI DAN MALUKU**  
**Makassar, 6 - 7 April 2005**

**PROSIDING**

**KUMPULAN MAKALAH HASIL PENELITIAN**

**"Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menghadapi ASEAN Economic Community 2015"**



**Indonesian Association For Public Administration (IAPA) Wilayah Sulawesi dan Maluku**  
**Bekerjasama dengan Pascasarjana Administrasi Pembangunan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Hasanuddin**

KUMPULAN MAKALAH

**"PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH MENGHADAPI  
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015"**

SEMINAR NASIONAL IAPA WILAYAH SULAWESI DAN MALUKU

TIM PENYUSUN

Ketua

Dr. Alwi, M.Si

Sekretaris

Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.

Anggota

Dr. Delly Mustafa, M.Si

Dr. Gita Susanti, M.Si

Muh. Irvan Nur Iva, S.Sos.

Isgunandar, S.IP.

Andi Rahmat Hidayat, S.Sos.

Indonesian Association for Public Administration (IAPA)  
Pengurus Wilayah Sulawesi dan Maluku  
Bekerjasama dengan Pascasarjana Administrasi Pembangunan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

## DAFTAR ISI

<b>Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir</b>	
<i>Hasriati</i> .....	1
<b>Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Makassar Sulawesi Selatan</b>	
<i>Fatmawati Andi Mappasere dan Muhammad Idris</i> .....	11
<b>Jaringan Pelayanan Publik Yang Demokratis (Studi Kasus Sistem Koordinasi Dalam Penentuan Strategi Pelayanan Pendidikan Berbasis Jaringan Di Kota Makassar)</b>	
<i>Gita Susanti</i> .....	19
<b>Kepemimpinan Dan OCB Dalam Organisasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan</b>	
<i>Muhammad Akmal Ibrahim , Andi Aslinda, dan Muhammad Guntur</i> .....	26
<b>Tanggung Jawab Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar</b>	
<i>Delly Mustafa</i> .....	34
<b>Implementasi Model kepemimpinan Transformasional Dalam Mewujudkan Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan</b>	
<i>Darwati</i> .....	42
<b>Model Inovasi Berbasis Kolaborasi Di Kota Baubau</b>	
<i>Syahril Ramadhan</i> .....	49
<b>Menguak Perilaku Pemimpin Dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap</b>	
<i>Mustafa Hasbar</i> .....	55
<b>Analisis Aktor Penyelesaian Konflik AntarDesa Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Selatan</b>	
<i>Roma Tressa</i> .....	64
<b>Kemampuan Pemerintah daerah Dalam Mengembangkan Potensi Daerah Berbasis Unggulan dan Berdaya Saing</b>	
<i>Lukman Hakim</i> .....	71
<b>Penerapan Budaya Organisasi Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan Kota Makassar</b>	
<i>Ilyani Malik dan Rudi Alwiyah</i> .....	78
<b>Valuesystem Dalam Manajemen Pemerintah dan Pembangunan (Perspektif Pemberdayaan Masyarakat)</b>	
<i>Mappamiring</i> .....	85

## KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH BERBASIS UNGGULAN DAN BERDAYA SAING

Lukman Hakim

### Abstrak

*Makalah ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok, antara lain: (1) masih banyaknya potensi daerah berbasis unggulan dan berdaya saing yang kurang di kelola pemerintah daerah yang dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, (2) potensi daerah yang kurang di kelola tersebut, mengakibatkan rendahnya pendapatan asli daerah dan semakin tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu makalah hasil penelitian ini membahas bagaimana kemampuan aparat pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber-sumber potensi daerah yang berbasis unggulan dan berdaya saing, dan sejauh mana partisipasi masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program pengembangan potensi daerah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam untuk memperoleh data dan informasi yang valid. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara komperhensif mengenai kemampuan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sumber-sumber potensi daerah yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan, kemampuan aparat di Kabupaten Bantaeng lebih proaktif dan inovatif dalam mengembangkan potensi daerah dari pada aparat Kabupaten Pangkep. Begitupun partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengembangan potensi daerah khususnya pertanian dan semua program-program dari pemerintah sangat didukung oleh masyarakat sehingga semua perencanaan di tingkat kabupaten itu terumus dengan baik dan ketika disampaikan kepada masyarakat, maka masyarakatpun merespon dengan baik pula.*

**Kata Kunci:** Pengembangan, potensi daerah unggulan, berdaya saing

### 1. Pendahuluan

#### Latar Belakang

Di era otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota dapat mengoptimalkan potensi spesifik yang ada untuk meningkatkan daya saing. Dengan daya saing yang baik, produk lokal dapat berkompetisi dengan produk luar sehingga dapat menambah jumlah pemasukan daerah. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah masih banyaknya potensi daerah berbasis unggulan dan berdaya saing yang kurang di kelola pemerintah daerah yang dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan potensi daerah yang kurang di kelola tersebut, mengakibatkan

rendahnya pendapatan asli daerah dan semakin tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu kajian penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan secara khusus yakni: seberapa jauh kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber-sumber potensi daerah yang berbasis unggulan dan berdaya saing dan sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program pengembangan. Apabila APBD hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat, maka akan sulit dan lambat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seyogyanya pemerintah daerah

memanfaatkan peluang yang besar untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal dalam mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Oleh sebab itu pengembangan daya saing berbasis potensi daerah menjadi sangat penting agar setiap daerah mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam pertumbuhan ekonominya serta dapat mengelola dan memecahkan masalah pembangunan di daerah. Dengan demikian setiap daerah perlu menggali seoptimal mungkin kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dimilikinya agar mampu *survive* dan *sustainable* dalam mengelola pemerintahannya.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka masalah pokok yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kemampuan aparat pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah yang berbasis unggulan dan berdaya saing
- 2) Sejauh mana partisipasi masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program pengembangan potensi daerah yang berbasis unggulan dan berdaya saing

#### Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok diatas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kemampuan aparat pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah yang berbasis unggulan dan berdaya saing, sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai kualitas aparat pemerintah daerah dan merekomendasikan strategi peningkatan kualitas kemampuan aparat.

- 2) Mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program pengembangan potensi daerah, sehingga dapat merekomendasikan strategi dan model peningkatan partisipasi termasuk seluruh *stakeholder* yang terlibat.

#### Metode Penelitian

Lokasi penelitian yaitu: Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*). Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam lima tahun terakhir memiliki terobosan di bidang pertanian dan perikanan serta potensi pariwisata yang cukup besar kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi daerah, dan Kabupaten Pangkep memiliki sumberdaya alam yakni sektor pertambangan, perikanan dan pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis-jenis penelitian yang relevan seperti *triangulasi* untuk memperoleh sumber-sumber informasi mengenai potensi daerah. Analisis data primer dilakukan atas *statement* (*statement*) atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan.

#### 2. Landasan Teori

Hasil penelitian pengembangan potensi pembangunan di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Sulandri, Susi, dkk (2010) menunjukkan bahwa aparat desa dan perkotaan tidak memadai menjalankan pembangunan semua aset yang merupakan sumber daya yang

potensial. Oleh karena itu pengembangan bidang keahlian yang sesuai dengan potensi daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas SDM agar mampu mewujudkan misi dan visi pembangunan untuk meningkatkan pembangunan di daerah yang lebih mengedepankan pada pengembangan potensi daerah (Wally, 2010).

Hasil survei yang dilakukan Hidayati (2011) terhadap pengembangan sumber daya alam di Kabupaten Gowa, bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, rakyat kurang mendapat hak dan jaminan hukum untuk ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di desanya, termasuk soal penataanruang atau kawasan dan pemberian izin dan investasi. Potensi daerah dimaknai sebagai sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai upaya pengembangan kemampuan daerah (Sumihardjo, 2008). Semakin tinggi angka keterlibatan masyarakat pada sumber-sumber alam tertentu, maka semakin tinggi kontribusi sumber-sumber tersebut terhadap perkembangan ekonomi setempat.

Sumberdaya aparatur di daerah terdiri dari dua kelompok, yaitu pejabat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas-tugas otonomi seperti kepala dinas dan pejabat sekretariat daerah. Sedangkan kelompok kedua adalah pegawai atau pejabat pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah seperti yang ada di semua instansi vertikal ((Syaukani, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2007). Menurut Sumihardjo (2008) pengembangan potensi daerah dituntut adanya peningkatan kualitas aparatur yakni: (1) kualitas moral, kinerja yang tangguh, jujur, proaktif, inovatif, dan

egaliter agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Potensi unggulan daerah akan dapat terekplorasi dan dikelola dengan baik jika didukung oleh adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai warga setempat dapat mengetahui sektor lapangan usaha yang dapat dijadikan sektor-sektor unggulan potensi daerah serta dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi mereka. Menurut Ndraha (1990) pada fase permulaan gerakan pembangunan desa di berbagai negara, parakarsa (*initiative*) yang disebut partisipasi sebagai salah satu elemen proses pembangunan desa perlu dibangkitkan. Berbagai sumber menyatakan, penggerakan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri (PBB; Bhattacharyya, *Asian Development Bank* dalam Ndraha, 1990).

### 3. Pembahasan

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah baik di Kabupaten Pangkep maupun Kabupaten Bantaeng dapat dilihat dari kemampuan aparat pemerintah daerah yang meliputi: kinerja aparatur daerah, proaktif aparatur, Inovasi aparatur dan sikap egaliter aparatur.

#### Kinerja Aparatur

Kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah dapat diketahui dari beberapa indikator kualitatif antara lain: bagaimana keterlibatan aparatur daerah dalam perumusan dan penyusunan potensi daerah, yakni potensi sumber daya alam seperti pertanian, pariwisata, pertambangan, dan lain-lain yang berbasis unggulan. Berdasarkan indikator tersebut, ditemukan bahwa di Kabupaten Pangkep para aparatur telah menyadari pentingnya keterlibatan

mereka dalam perumusan dan penyusunan potensi daerah sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur daerah, namun keterlibatan tersebut masih bersifat parsial sebagai konsekuensi dari tugas dan jabatan yang diemban, sehingga kurang didasari oleh keinginan dan inisiatif sendiri sebagai sebuah tantangan dalam perumusan dan penyusunan potensi daerah tersebut.

Sementara kinerja aparatur di Kabupaten Bantaeng dalam pelibatan perumusan dan potensi daerah, pada umumnya menganggap sebagai tugas pokok dalam memanfaatkan, dan mengatur potensi daerah yang dimiliki. Pelibatan tersebut berdasarkan tim work yang melibatkan semua SKPD, unsur masyarakat, dan unsur perguruan tinggi yang dapat memberi pandangan-pandangan dari sisi akademiknya. Pelibatan tim work tersebut bukan hanya sampai pada tahap perumusan dan penyusunan potensi daerah, tetapi juga sering diikutkan dalam pertemuan, seminar dan lokakarya. Para aparatur di Kabupaten Bantaeng lebih elegan dan dominan dalam mengembangkan gagasan pengembangan potensi daerah sehingga dapat berdampak positif untuk menarik para investor.

#### **Proaktif Aparatur**

Aparatur pemerintah daerah perlu pula proaktif mendapatkan pemberitaan dan informasi di media baik cetak maupun elektronik agar lebih termotivasi mengembangkan potensi daerah dan mengetahui peta kekuatan sumber-sumber kekayaan alam yang ada di daerah tersebut. Informasi yang sering didapatkan aparatur Kabupaten Pangkep masih terbatas pada pemberitaan dan informasi di media surat kabar dan buku yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang potensi yang dimiliki Kabupaten Pangkep. Lain halnya di

Kabupaten Bantaeng, wilayah ini yang juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai seperti hasil-hasil pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata dan sumber air mineral yang diproduksi untuk dikonsumsi secara komersial. Daerah ini memiliki aparat dalam ruang lingkup Bappeda yang berfokus mengidentifikasi potensi sumber daya apa yang dapat dimaksimalkan di Bantaeng untuk dapat diekspor keluar, dan jika perumusan dan penyusunan potensi daerah kurang sesuai dengan yang seharusnya, maka aparat lainnya dilibatkan atau dikut sertakan untuk mengoreksi dan memperbaiki.

#### **Inovasi Aparatur**

Aparatur Kabupaten Pangkep selalu mencoba mengeksplorasi sumber-sumber potensi daerah tersebut, misalnya bagaimana mengembangkan potensi perikanan budi daya baik budi daya air tawar maupun air laut. Kabupaten Pangkep memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan sangat prospektif, namun masalahnya adalah terkendala pada sektor pemasaran khususnya pasar ekspor dan tidak adanya pabrik atau industri pengolahan hasil-hasil sumber daya perikanan. Aparatur daerah Kabupaten Bantaeng, memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan informasi baru mengenai sumber-sumber potensi daerah, yakni dengan cara menyerap informasi dari masyarakat melalui rapat koordinasi setiap bulan yang sering dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat tersebut hadir semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, dalam hal ini Bappeda untuk mendengarkan masukan dari masyarakat.

## Egaliter Aparatur

Sikap egaliter aparatur pemerintah Kabupaten Pangkep ditunjukkan dengan kegiatan mensosialisasikan keunggulan potensi daerah dengan turun langsung ke tingkat kecamatan dan bertemu dengan semua kepala desa dan melakukan pembinaan kelompok serta bekerja sama dengan para penyuluh. Dalam kegiatan tersebut beberapa aktivitas yang dilakukan misalnya sosialisasi teknologi budi daya bidang perikanan serta pemasarannya dengan membuat tempat percontohan dengan harapan masyarakat nantinya bisa memanfaatkannya. Dengan potensi perikanan yang cukup besar, maka promosi melalui kampanye kerap pula dilakukan dengan mengutus beberapa orang aparat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sama halnya fenomena perilaku egaliter para aparat di Kabupaten Bantaeng yang mencerminkan pentingnya berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan menghadiri langsung undangan pertemuan, karena mereka menganggap hal tersebut sebagai amalan reformasi birokrasi dengan memaksimalkan pelibatan masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan., termasuk sikap egaliter tersebut dengan antusias dan paling *welcome* dalam hal menerima aktifis pengembang dari luar. Inovasi masyarakat dapat berkembang secara baik karena mendapat dukungan langsung dari aparatur dengan menghadiri undangan-undangan dari masyarakat.

## 4. Kesimpulan dan Saran

1) Kemampuan pemerintah daerah mengembangkan potensi daerah yang berbasis unggulan dan berdaya saing ditentukan oleh kemampuan aparat pemerintah daerah yang memiliki kompetensi. Sumber daya alam yang beraneka ragam, unggul

dan memiliki daya saing ekonomi hanya dapat dikembangkan oleh kualitas aparat yang memadai.

- 2) Persoalan pemerintahan daerah tidak hanya terkait dengan masalah-masalah pelayanan birokrasi yang kurang efisien dan efektif, tetapi kualitas pengetahuan aparat, ketekunan dan keberanian mengambil tindakan dan keputusan sangat diperlukan agar daerah dapat menambah sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
- 3) Aparat pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang tinggi, selalu proaktif merencanakan dan mengembangkan potensi unggulan yang ada di daerah serta inovatif mencari terobosan-terobosan baru bermitra dengan para investor, direpson tinggi oleh partisipasi masyarakat, dan berkepribadian yang jujur harus diberi penghargaan baik berupa insentif maupun promosi jabatan yang lebih tinggi.
- 4) Pemerintahan daerah perlu berpikir strategis kedepan agar sumber daya manusia aparat pemerintahan di daerahnya dapat dioptimalkan kemampuannya sebagai magnit pengelola sumber-sumber kekayaan yang dimiliki daerah.
- 5) Sebagai upaya untuk memaksimalkan kemampuan masyarakat mengembangkan potensi daerah berbasis unggulan dan berdaya saing khususnya potensi sumber daya alam lokal seperti pertanian, pertambangan, perikanan dan pariwisata setempat secara riil, agar mereka dapat lebih memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan, maka perlu mengembangkan model *community base natural resource development participation* yang

merupakan program yang penting untuk dikembangkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masalah ketidakberdayaan masyarakat tidak selamanya disebabkan karena ketiadaan modal sekalipun modal tetap dipentingkan. Namun, lebih banyak dikarenakan kesadaran dan etos kerja yang belum terbangkitkan agar dapat ke luar dari masalah ekonomi yang dihadapi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. (Terjemahan) Penerbit: *The World Bank*
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2001. *Pembangunan Daerah*. <http://www.bappenas>, diakses tanggal 8 Maret 2012 pukul 11.00 wita.
- BBadan Pusat Statistik, 2012. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantaeng*. Penerbit BPS Kabupaten Bantaeng
- Badan Pusat Statistik, 2012. *Statistik Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Penerbit BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Badan Pusat Statistik, 2012. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Penerbit BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Bryant, C and White, L.G, 1982. *Managing Development in The Third World*, Boulder Colorado: Westview Press.
- Hidayati, Nurfitri. 2011. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam di Era Otonomi Daerah di Kabupaten Gowa (Makalah) Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta
- Prasetyo, P. Eko, Marimin dan Andang Samsudin S. 2009. Model Kaji Tindak Pembangunan Partisipatif Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Rawan Pangan Berbasis Potensi Lokal dan Ekonomi Kreatif (Penelitian Hibah Kompetitif), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, 2007. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suglyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Sulandri, Susi, dkk. 2010. *Identifikasi Pengembangan Potensi Daerah Kantong-Kantong Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Dokumentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sumihardjo, Tumar, 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Susanto, Irwan dan Kristono, 2011. Analisis Fishbone (Isikawa Diagram), <http://irwanst.blogspot.com>, Diakses tanggal 8 Maret 2012 Pukul 17.00 wita.
- Tomo, Alamsyah. 2012. Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Unggulan di Era Otonomi Daerah, Kasus Kabupaten Jeneponto (Makalah), Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah  
dan Otonomi Daerah

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008  
Tentang Pemerintahan Daerah

Uphoff, N. 1988. *Local Institutional  
Development*. Fransisco: Cornell  
University Press

Wally, Ibrahim Abdulmani, 2010 Potensi  
Daerah Sebagai Dasar  
Penentuan Konsep  
Pengembangan Bidang Keahlian  
Sekolah Menengah Kejuruan di  
Kabupaten Buru  
<http://ejournal.its.ac.id/ITS-Master>,  
diakses tanggal 11 Maret 2012  
Pukul 8.00 wita.

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan  
Otonomi di Indonesia*, PT  
Rajagrafindo Persada, Jakarta